

WACANA KOMUNISME DALAM PILPRES TAHUN 2014 DI INDONESIA PADA PORTAL BERITA *ONLINE* TEMPO.CO DAN REPUBLIKA.CO.ID

Oleh: Muhammad Bisri Musthafa – 071115047

Email: Bisrigatel@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah studi yang secara kritis membaca dua portal berita online, yakni *Tempo.co* dan *Republika.co.id*, yang mengartikulasikan pewacanaan komunisme selama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (disingkat Pilpres) Indonesia tahun 2014, melalui pelbagai teks beritanya. Pembacaan ini bertujuan untuk menguak ‘variabel’ atau factor-faktor yang menjadi basis dalam mengondisikan praktik pewacanaan komunisme yang terjadi. Untuk menganalisis, penelitian ini menggunakan *Critical Discourse Analysis (CDA)* model Norman Fairclough. Untuk menemukan bagaimana wacana komunisme diartikulasikan oleh kedua portal berita online yang dikaji, peneliti mengaitkan beberapa konsep yang saling berkaitan. Beberapa konsep tersebut antara lain adalah konstruksi realitas media massa, konsep stigma, konsep hegemoni, konsep wacana politik, teori ekonomi-politik media dan konsep produksi media online. Penelitian ini berpegang pada paradigma kritis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana komunisme yang diartikulasikan oleh *Tempo.co* dan *Republika Online* berkaitan dengan dua bidang, politik dan ekonomi. Konstruksi terhadap komunisme yang terbentuk merupakan konsekuensi dari posisi politik yang diambil oleh masing-masing portal berita, dalam pewacanaan komunisme di Indonesia. Konsistensi kedua media yang dikaji dalam merekatkan pewacanaan komunisme dengan dinamika pertarungan politik telah menutup topik alternatif dalam pewacanaan komunisme, yang tumbuh selama era reformasi, untuk muncul kepermukaan. Pada akhirnya, pewacanaan komunisme yang terjadi ini dijadikan bahan baku untuk membentuk komoditas bagi portal berita online, yakni pembaca.

Kata kunci: Indonesia, wacana komunisme, pilpres 2014, ekonomi-politik media, portal berita online.

PENDAHULUAN

Penelitian ini adalah studi yang secara kritis membaca dua portal berita online, yakni *tempo.co* dan *republika.co.id*, yang menampilkan pewacanaan komunisme selama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (disingkat Pilpres) Indonesia tahun 2014, melalui pelbagai teks beritanya. Pembacaan ini bertujuan untuk menguak ‘variabel’ atau faktor-faktor yang mengondisikan praktik pewacanaan komunisme yang terjadi. Hal ini mengingat bahwa praktik pewacanaan, dalam hal ini komunisme, haruslah dimengerti sebagai ‘a reflex of situational variables’ (Fairclough 1993). Variabel-variabel ini tentu berkaitan dengan beragam konteks (sosial, budaya, ekonomi, dan politik) di Indonesia, yang menjadi latar dari pewacanaan komunisme yang akan diteliti. Terikatnya wacana dengan pelbagai kondisi kontekstual merupakan kosekuensi penelitian ini dalam memandang wacana sebagai modus

dari praktik social dalam menggambarkan pelbagai hal (Fairclough 1993). Sementara itu ‘term’ komunisme yang dimaksud dan diteliti dalam penelitian ini adalah komunisme sebagai ideologi. Rentang peristilahan ideologi disini mencakup peristilahan nilai-nilai, makna social, hingga ide-ide tentang sesuatu (Wadipalapa 2010, p.4). Sehingga kajian terhadap wacana komunisme dapat diartikan sebagai kajian yang menguak mulai dari penggambaran atas komunisme, yang di dalamnya nilai, makna social hingga ide-ide dalam mengkonstruksikan komunisme menjadi fokus kajiannya, hingga pembacaan terhadap konteks sosial-budaya yang menjadi medan atau *locus* dari penggambaran komunisme.

Melihat rentang pengertian diatas, sebagai studi wacana komunisme di Indonesia, penelitian ini merasa wajib untuk membahas peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S 1965. Peristiwa yang oleh John Rossa (2008) dianggap sebagai awal dari kekerasan tahun 1965-1966 di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya korban meninggal. Seymour Topping (dalam Rossa 2008, p 31) memperkirakan bahwa jumlah korban meninggal atas aksi-aksi kekerasan tahun 1965-1966, lebih dari setengah juta jiwa. Peristiwa ini pula yang digunakan untuk mendirikan rezim Orde Baru. Orba sendiri adalah sebutan bagi orde Politik yang dipimpin oleh presiden Soeharto. Peristiwa tersebut digunakan untuk menuding Komunis sebagai ‘dalang’. Narasi tentang komunis sebagai dalang ini terus direproduksi oleh Orba untuk mendapat legitimasi kuasanya (Narwaya, 2010). Hal ini pun mirip dikemukakan oleh Ariel Heryanto. Dengan merujuk film Pengkhianatan G 30 S/PKI, sebuah film yang mendramakan peristiwa G 30 S ’65 buatan pemerinta Orba, Ariel Heryanto (2006, p 9) menguraikan bahwa,

“(...)the event is to be seen chiefly as an abortive coup d’etat by the 30 September Movement, masterminded by the Indonesia Communist Party, thus providing legitimation for the military’s eradication of its main political enemy as the perpetrator”.

Pewacanaan Orba atas *coup d’etat* yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia ini, pada akhirnya memberi alasan bagi orba untuk memberangus komunisme di Indonesia. Dari peristiwa ini pula stigma anti-pancasila dilekatkan kepada komunisme (Narwaya 2010). Narasi pemberontakan, dengan serangkaian pembunuhan terhadap Perwira tinggi AD pada September 1965 ini dianggap sebagai cara PKI mendirikan negara berpaham komunisme, dan menjadi dalih pembenar bagi stigma tersebut. Dalih itu juga dipakai oleh Orba untuk mewajarkan pelbagai aksi kekerasan pasca kejadian G30S ’65, sebab dianggap demi membela ‘kesucian’ pancasila sebagai ideologi Negara (Narwaya 2010), yang muaranya adalah memantapkan stigma anti-pancasila yang dibuat orde baru terhadap komunisme.

Stigma lain yang juga berkembang di jaman Orba adalah stigma antiagama-antituhan-ateis. Komunisme digambarkan sebagai paham yang menyebarkan ateisme dan hendak menghapus sila pertama dari Pancasila. Hal ini telah diuraikan oleh Budiawan dalam bukunya yang berjudul *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Dia mengatakan bahwa stigma anti-tuhan komunisme direproduksi lewat beberapa ‘cerita rakyat’ yang populer yang dituturkan di jaman Orde Baru. Budiawan (2004, p 58-59) mengatakan bahwa cerita ini terus tetap ada melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang telah dia didengar semenjak sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Salah satu yang paling populer adalah cerita rakyat yang membahas suatu pementasan sandiwara rakyat yang dilakukan PKI tentang ‘Matinya Tuhan’.

Pewacanaan komunisme di Indonesia kemudian tampak berubah pasca Orde yang dipimpin Soeharto tersebut, runtuh di tahun 1998. Ditengah perubahan ini, salah satu isu yang cukup menarik perhatian peneliti adalah gagasan *Rekonsiliasi Nasional*. Pelbagai praktik Orba terhadap komunisme di Indonesia ternyata membawa konsekuensi perpecahan masyarakat. Pelbagai perseteruan di tingkat akar rumput yang merupakan akibat dari diartikulasikan wacana komunisme oleh orde baru, untuk mengatasinya diperlukan suatu penanganan khusus. Hal sebagaimana ditekankan oleh Hesri Setiawan mengenai gagasan rekonsiliasi Nasional yang muncul di era reformasi Indonesia. Untuk hal tersebut Hesri (dalam Budiawan 2004, p.11) mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni

‘(...) *pertama* ialah penyembuhan masyarakat (Indonesia) dari luka parah atau trauma sejarah; dan yang *kedua* ialah perukunan kembali masyarakat dari rasa pemusuhan masa lalu yang sengaja di-“meterai”-kan di lubuk-hati dan jantung sejarah bangsa (Setiawan dalam Budiawan 2004, p 11)’.

Pelbagai kajian tentang wacana komunisme di Indonesia pun semangat banyak muncul di saat reformasi. Kemunculan pelbagai kajian ini juga menjadi pertanda babak baru pewacanaan komunisme yang dimaksud peneliti sebelumnya. Kajian-kajian yang muncul ini terutama menyoroti, sekaligus mengkritik, praktik pewacanaan komunisme saat orde baru masih berkuasa. Pembahasan utamanya adalah mengkritisi praktik ‘menyetankan komunis’ di Indonesia, melalui pembuatan sejarah formal terutama tentang narasi peristiwa G 30 S ‘65, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Ditengah dominannya kajian yang bersifat kesejarahan, peneliti juga melihat bahwa praktik pewacanaan komunisme kontemporer merupakan sesuatu yang cukup menarik untuk diteliti. Fokusnya adalah melihat artikulasi wacana komunisme di Indonesia saat ini dan hubungannya dengan bangunan wacana komunisme yang diwariskan Orde Baru. Pewacanaan komunisme warisan orde baru tentu masih tetap menjadi variabel yang penting untuk diamati,

karena stigma-stigma atas komunisme yang dibangun Orba ini pada perkembangannya turut mengondisikan praktik pewacanaan komunisme kontemporer. Hal ini sebagaimana yang dikatakan John Rossa (dalam Zaki 2012) yang menganggap pembahasan Orba tak boleh dilewatkan dalam kajian mengenai wacana komunisme di Indonesia, sebab hal-hal tersebut ikut mengondisikan pewacanaan komunisme yang terjadi sekarang. Pilpres 2014 kemudian menurut peneliti menjadi medan pas untuk penelitian jenis ini.

Pada pengamatan awal, peneliti berasumsi kalau wacana komunisme di Pilpres 2014 ini memiliki hubungan dengan masalah legitimasi dan delegitimasi kekuasaan yang salah satunya terlihat dari isu Jokowi sebagai kader komunis. Bantahan Jokowi terhadap wacana komunisme yang ditudingkan kepadanya dan mencapnya sebagai *kampanye hitam*, dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang menghindar dari ‘representasi diri negatif’ yang menjadi akibat dari tuduhan komunis tersebut. Selain Jokowi, keterlibatan aktor-aktor politik lainnya dalam pewacanaan komunisme di Pilpres 2014 merupakan daya tarik lain untuk meneliti masa pilihan presiden tersebut. Terutama ketika mengingat pelbagai aktor yang dimaksud tersebut merupakan aktor-aktor yang memiliki posisi politik di Indonesia, baik saat Pilpres maupun setelahnya. Penelitian ini sendiri melihat bahwa rentang Pilpres 2014 adalah dimulai 31 Mei 2014 dengan diumumkannya calon presiden dan wakil presiden oleh Komisi pemilihan Umum (KPU), dan berakhir ketika Komisi yang sama menetapkan nama calon pemenang Pilpres pada tanggal 22 Juli 2014.

Berkembangnya wacana komunisme di Pilpres 2014 juga dipengaruhi hadirnya pers yang meliput setiap peristiwa yang terjadi. Pelbagai wacana yang berkembang selama rentang waktu tersebut akan menjadi bahan yang menarik untuk dijadikan berita. Melalui berita-beritanya ini setiap wacana yang muncul, terutama yang dilontarkan oleh aktor-aktor politik, dikabarkan kepada masyarakat, yang salah satunya adalah wacana komunisme. Selain itu, dugaan peneliti jika wacana komunisme berkaitan dengan perkara legitimasi politik membuat posisi media massa menjadi vital dalam topik ini. Hal ini mengingat bahwa “media kerap menjadi rujukan instan bagi pensikapan publik atas fenomena sosial tertentu (Masduki 2004, p.77)”. Atas argumen inilah peneliti kemudian mempersempit *locus* penelitiannya pada teks berita dari pers yang beredar di masa Pilpres 2014. Sedangkan pers yang dipilih sebagai objek kajian adalah *Tempo.co* dan *Republika.co.id*.

Adanya persinggungan politik antara induk perusahaan dari kedua pers (*Tempo* dan *Republika*) dengan wacana komunisme dan politik orde baru, merupakan dasar utama pemilihan kedua portal berita online tersebut sebagai objek kajian. Selain alasan konsistensi melakukan kritik tajam terhadap pemerintahan Orde baru, alasan lain pemilihan *tempo*

sebagai objek kajian adalah konsistennya menuntut pengusutan seputar kontroversi HAM terhadap korban tragedi '65. Pewacanaan komunisme seakan salah satu sajian rutin bagi tempo, terutama memperingati G30S '65. Salah satu contoh terbitan mengenai ini adalah Majalah Tempo Liputan Khusus edisi tanggal 1-7 oktober 2012. Pada Edisi ini, Tempo coba mengangkat pelbagai pengakuan mantan algojo atau pembunuh 'orang komunis'.

Berita-berita Republika selalu dikaitkan dengan arah politik dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Yayasan Adi Bangsa, yayasan yang menaungi harian Republika, adalah yayasan yang didirikan ICMI (Erawati 2011). ICMI sendiri merupakan sebagai proyek guna membentuk aliansi kekuatan politik islam agar terkonsolidasi dibawah kuasa Orde Baru (Dhakidae 2003). Sebagai salah satu pers islam, Republika tentu sangat menarik untuk diteliti terutama ketika mengingat adanya stigma komunisme sebagai penyebar ateisme, meskipun penyokong dari ICMI yakni Orba telah runtuh.

Selanjutnya, terdapat dua alasan bagi dipilihnya lini online dari kedua media tersebut untuk diteliti. *Pertama*, adalah soal peralihan minat masyarakat Indonesia, yang notabene merupakan para pemilih di Pilpres 2014, yang semakin meningkat dalam mengakses media online sebagai rujukan informasinya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas. Portal Berita Online menempati posisi ketiga, dalam kategori 'Media yang sering digunakan untu mencari Informasi' (Kompas 9 Februari 2015, p.5). Portal berita online dipilih dengan prosentase 25,9 % atau hanya berselisih 0,7 % dengan surat kabar cetak, diposisi kedua. *Kedua*, portal berita online merupakan media yang sangat masif dalam memproduksi media. Cara pemberitaan portal berita online yang sering disebut *running news*, yakni sebuah penyajian berita serial yang meniru cara *breaking news* stasiun berita luar negeri, membuat produksi informasi dilakukan secara update dan real time. Sebuah hal yang menurut peneliti memiliki konsekuensi dalam memperkaya varian pewacanaan yang dilakukan. Semakin banyaknya varian dalam mengartikulasi wacana komunisme tentu menjadi sebuah hal yang menarik, khususnya dalam konteks penelitian ini yang fokusnya mengamati artikulasi wacana komunisme selama Pilpres 2014.

Sampai disini peneliti berasumsi bahwa wacana komunisme yang hadir selama Pilpres 2014 dipengaruhi dari dua dimensi kepentingan. Dimensi pertama berasal dari kontradiksi aktor-aktor politik yang terlibat dalam Pilpres, dan salah satunya menyangkut perkara legitimasi kekuasaan. Kedua, datang dari internal media massa, yang itu dapat dilihat dari sikapnya atas wacana komunisme yang terjadi. Kedua hal ini dapat dipastikan dari artikulasi wacana komunisme yang termuat dalam berita-berita dari kedua media yang dikaji. Sehingga masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana komunisme diartikulasikan selama Pilpres

2014 oleh berita-berita pada portal berita *Tempo.co* dan *Republika.co.id*. Untuk mengurai dan membuktikan hal ini, peneliti akan memilih metode *Critical Discourse Analysis* (CDA) milik Norman Fairclough sebagai pisau analisa. Metode ini dipilih karena analisis wacana ini mengintegrasikan aspek lingustik dengan pemikiran sosial-politik (Eriyanto, 2001). Untuk mempermudah mengurai permasalahan penelitian, peneliti juga mengaitkan analisisnya dengan beberapa konsep, antara lain: konstruksi realitas media massa, konsep stigma, konsep hegemoni, konsep wacana politik, teori ekonomi-politik media dan konsep produksi media online.

PEMBAHASAN

Pada analisis teks berita-berita pada *Republika.co.id* peneliti menemukan tentang adanya upaya portal media ini dalam mengkonstruksikan kebangkitan komunisme di Indonesia, sebagai sebuah hal yang nyata. Terdapat dua penopang dalam memuluskan konstruksi ini, pemaknaan terhadap komunisme sebagai sebuah hal yang berbahaya dan konstruksi PDIP sebagai sarang baru bagi komunis. Pada topangan pertama, peneliti melihat *republika.co.id* sedang mereproduksi pertautan pewacanaan komunisme dengan dua stigma terhadap komunisme warisan Orba, yakni stigma *anti-pancasila* dan stigma *anti-agama*.

Ditautkannya stigma anti-pancasila dalam mewacanakan komunisme dapat terlihat dari upaya *republika* mengarahkan pembacanya pada peristiwa G 30 S '65. Hal inilah yang terlihat pada berita berjudul *Isu Pembekuan Babinsa Dianggap untuk Bangkitkan Komunis*. Pada berita ini peneliti melihat upaya membawa kembali pewacanaan komunisme pada peristiwa tersebut dengan menuding bahwa isu pembubaran babinsa merupakan 'pengulangan' dari apa yang dilakukan D.N. Aidit di tahun 1964. D.N. Aidit sendiri merupakan ketua dari PKI, organisasi yang diklaim sebagai perwujudan visi politik komunisme di Indonesia, saat peristiwa G 30 S '65 terjadi. Selain itu, hal yang sama juga terlihat dari berita *Tim Pemenangan Prabowo Minta NU Waspada*, dengan penanda utama peristiwa pembunuhan seorang Kyai di Pamekasan. Pemilihan cerita pembunuhan yang terjadi pada "26 juli 1965", peneliti melihat untuk mengarahkan pembaca pada peristiwa di tahun yang sama, yakni G30S '65, sehingga kesan bahaya dan permintaan kewaspadaan terlihat lebih utuh.

Dipilihnya peristiwa G 30 S '65 sebagai situs dalam konstruksi komunisme sebagai anti-pancasila memiliki kaitan dengan apa yang diuraikan Tri Guntur Narwaya tentang 'memori kolektif' tentang pewacanaan komunisme dan hubungannya dengan salah satu instrumennya adalah peringatan 'Kesaktian Pancasila'. Selain itu penambahan kata /PKI

dalam menyebut peristiwa G 30 S '6, sesuatu yang juga ditemukan dalam berita republika.co.id yang dianalisis, memperkuat anggapan ini. Untuk hal ini ia mengatakan,

‘Keberhasilan membangun *memori kolektif* ini (dapat dilihat dari) Monumen (dan Momentum) Kesaktian Pancasila dibangun dengan megahnya. Ia menjadi ‘tanda dan pesan sekaligus. Ia menggambarkan ‘keberhasilan gemilang’ negara (orde baru) untuk menghadang rongrongan jahat PKI (Narwaya 2010, p. 142)

Selain dengan menunjukkan beberapa peristiwa perseteruan PKI dan kelompok islam di Indonesia, sebagaimana terlihat dari berita *Tim Pemenangan Prabowo Minta NU Waspada*, stigma anti-agama komunisme juga dibangun dengan menunjukkan mengenai nilai komunisme bertentangan dengan nilai islam. Hal ini terlihat dari berita '*Rovolusi Mental, Gagasan Sosialis-Komunis*' dan *PDIP: TV One Sengaja Fitnah Jokowi!*. Pada berita pertama, yang menempatkan peneliti islam, Habib Alatas, sebagai narasumber berisi pembelaan Alatas tentang pernyataan Fadli Zon perihal Revolusi-Mental sebagai ajaran komunis. Berdasar penggalan kalimat Karl Marx pada buku *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*, yakni “agama adalah candu”, narasumber memulai konstruksinya perihal komunisme yang anti agama. Sedangkan narasi tentang pergantian nama ‘Ahmad’ menjadi ‘Dipa Nusantara’ yang dilakukan oleh Adit, pimpinan PKI pada peristiwa G30S '65. menunjukkan penekanan bahwa berita ini menunjukkan pertentangan ajaran komunisme dengan nilai islami, yang pada akhirnya menekankan stigma anti-agama pada komunisme.

Pada berita *PDIP: TV One Sengaja Fitnah Jokowi!* konstruksi anti agama dari komunisme dilakukan melalui pernyataan bantahan tudingan komunis yang dilayangkan pada PDIP. Narasumber berita yang merupakan salah satu fungsionaris PDIP, menunjukkan tegangan komunisme dengan agama melalui narasi tentang PDI-P sebagai partai yang memegang prinsip ketuhanan. Melalui narasi tersebut, berita ini menegaskan bahwa subjek yang berketuhanan tentu bukan komunisme. Sehingga dengan menunjukkan nilai ketuhanaan dari sang subjek, dalam hal ini PDIP, tuduhan komunisme merupakan sebuah hal yang tidak sah atau kurang tepat. Berikut ini kutipan berita ini yang menunjukkan hal tersebut,

“Menurut Zuhairi, publik juga tahu di dalam PDIP terdapat sayap Islam, yaitu Baitul Muslimin Indonesia. PDIP sadar betul bahwa Pancasila 1 Juni 1945 sejalan dengan nilai-nilai ke-Islam-an yang sangat menekankan al-ta'awun atau semangat gotongroyong.”

Berita terakhir diatas selain menunjukkan tentang stigma anti-agama komunisme, juga menunjukkan konstruksi republika.co.id mengenai sarang baru komunisme. Konstruksi sarang baru komunisme ini menjadi topangan utama bagi klaim republika.co.id tentang nyatanya kebangkitan komunisme di Indonesia. Konstruksi ini dimulai dengan menunjukkan

pelbagai gejala yang ‘diklaim’ sebagai ciri khasnya gerakan komunisme. Melalui kosa kata ‘mirip’ dan ‘cara komunis’ yang digunakan di beberapa berita dalam merespon pelbagai isu selama Pilpres 2014, menunjukkan hal tersebut. Hadirnya pelbagai mantan perwira militer dalam juga mendukung mapannya konstruksi ini. Para perwira ini seakan ditempatkan sebagai aktor yang cocok untuk mengidentifikasi kebangkitan komunisme di Pilpres 2014. Sebuah kebangkitan yang ditengarai melalui sarang baru bernama PDIP, partai utama pengusung Jokowi. Selain melalui pernyataan-pernyataan, gambaran PDIP sebagai sarang baru komunisme juga dikonstruksikan melalui foto berita. Foto yang dimaksud adalah foto dalam berita berjudul *Jokowi: Isu PKI Hina Nasionalisme Saya*. Meskipun berita tersebut memuat bantahan Jokowi perihal isu komunisme yang menerpanya, foto yang memotret *anggota PKI Batavia* plus keterangan foto yang bertuliskan ‘Kader Partai Komunis Indonesia (PKI)’, seakan menekankan bahwa yang berbicara sebagai narasumber adalah kader PKI. Foto berita dapat dipandang sebagai salah satu instrumen lain dalam pembentukan opini publik (Keller, 2009). Lihat Gambar 1 untuk foto yang dimaksud.



Gambar 1 Foto di Berita Jokowi: Isu PKI Hina Nasionalisme Saya

Melalui identifikasi tentang adanya sarang baru komunisme ini, yakni PDIP, republika.co.id seakan sedang menyediakan pintu masuk bagi militer untuk tampil di panggung politik Indonesia. Selain melalui banyaknya anggota militer yang berkomentar, hal ini juga dapat dilihat narasi kewaspadaan yang ditiupkan melalui konstruksi berbahayanya komunisme dan dibuat nyata kebangkitan komunisme di Indonesia. Kewaspadaan terhadap bangkitnya komunisme yang digunakan membentuk legitimasi bagi militer masuk ke ruang politik ini, mengingatkan peneliti pada kajian Jhun Honna. Honna (1999) mengungkapkan bahwa pewacanaan komunisme digunakan oleh militer untuk menjaga eksistensinya di panggung politik. Honna (1999) mengungkapkan tentang adanya strategi baru untuk memanfaatkan pewacanaan komunisme sebagai instrumen membungkam para pengritik pemerintah Orba. Komunisme pada strategi tersebut, digambarkan sebagai Organisasi cair setelah dilarang sejak tahun 1965. Istilah ‘Organisasi Tanpa Bentuk (OTB)’, digunakan untuk menggambarkan para simpatisan komunis yang menyebar dan menyusupi berbagai kelompok, khususnya kelompok yang menjadi oposan pemerintah. Sedangkan, istilah ‘Neo-Komunisme’,

gerakan komunis digambarkan tidak lagi mengampanyekan gagasan sosialis karena itu memang telah dilarang, tetapi melalui tuntutan demokrasi.

Melihat identifikasi kebangkitan komunisme dengan penanda ‘Neo-Komunisme’, ‘cara-cara komunisme’ yang dilakukan *republika.co.id*, merupakan bentuk reproduksi atas rumusan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dalam wacana komunisme di Indonesia. Lemhanas sendiri merupakan lembaga utama yang bentuk oleh Orde Baru dalam menjaga hegemoni terhadap komunisme dan strategi baru yang sebelumnya dibahas merupakan hasil rumusannya bersama Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) (Honnan 1999, p. 101-102). Melihat konstruksi tersebut, peneliti melihat bahwa *republika.co.id* seakan sedang dan ingin mempertahankan relasi yang telah dibentuk Orba atas komunisme. Hal ini juga menjadi bukti bahwa media ini telah menjadi kolaborator militer guna meneguhkan kembali eksistensinya di panggung politik Indonesia. Pemunculan penanda-penanda orba dalam pengartikulasian hal tersebut, merupakan bukti tunduknya *republika.co.id* pada kerangka ideologis orde baru terhadap pewacanaan komunisme.

Di tataran Pilpres 2014 sendiri, artikulasi sebagaimana yang peneliti uraikan juga menunjukkan sikap *republika* ikut membangun legitimasi politik bagi pencalonan ‘wakil kelompok militer’, yakni Prabowo. Ditudingnya PDI-P dan Jokowi sebagai representasi baru komunisme *plus* konstruksi tentang dibutuhkan militer dalam menanggulangi kebangkitan komunisme di Indonesia, konstruksi-konstruksi inilah yang dapat diartikan bentuk dukungan media milik Eric Tohir ini dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2014.

Konstruksi berbeda peneliti temukan saat menganalisis berita-berita dari *Tempo.co*, khususnya dalam mereproduksi narasi Orba terhadap komunisme. Untuk hal ini *tempo.co* seperti tidak mau tunduk pada Orba. Di dua berita peneliti menemukan bahwa *tempo.co* menegaskan sikap ini dengan meragukan kesahihan narasi Orba pada peristiwa G 30 S ’65. Dua berita yang dimaksud adalah *Akun Palsu Megawati Semprot Aburizal Bakrie* dan *Dituding Komunis, PDIP Protes Keras TV One*. Sedangkan penanda untuk hal yang dimaksud peneliti adalah kata ‘dituding’ yang menegaskan keraguan atas narasi tersebut, yang disematkan pada kutipan yang muncul di kedua berita tersebut yang isinya mendeskripsikan PKI,

“PKI merupakan partai yang dilenyapkan rezim Orde Baru karena **dituding** membunuh enam jenderal Angkatan Darat pada 1965. Mereka dituding melakukan pemberontakan dan mencoba merebut kekuasaan pemerintahan Sukarno, presiden kala itu. Di bawah pimpinan Soeharto, tentara Indonesia memberangus para kader dan simpatisan partai berlambang palu-arit itu. Mereka disiksa, dibantai, dan diasingkan ke Pulau Buru tanpa pembuktian hukum.”

Selanjutnya, peneliti juga menemukan hal yang menarik dari usaha *tempo.co* dalam membantah kebangkitan komunisme, yakni ‘sudut pandang korban’ yang coba diangkat. Pewacanaan komunisme Indonesia sepertinya hanya mengenal aktor-aktor dari pemerintah sebagai artikulator. Suara korban dalam pewacanaan komunisme selalu tersendat dan tidak dapat muncul pada arena utama pewacanaan. Tetapi Tempo, pada berita yang dianalisis mengambil jalan berbeda. Munculnya Jokowi dan fungsionaris PDIP pada berita-berita yang dikaji menunjukkan mengenai hal tersebut. Mereka diberikan ruang untuk membicarakan perasaannya pasca tuduhan sebagai komunis dilayangkan. Sebagai korban, pada berita tempo, mereka seakan mendapat ruang penuh dalam membantah tuduhan komunis. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh *republika.co.id*, yang telah dibahas dibagian sebelumnya, dimana bantahan Jokowi ‘seakan’ diintervensi dengan hadirnya foto ‘kader PKI’ yang dipasang pada berita yang dimaksud. Hal ini terlihat misal pada berita *Dituding PKI, Jokowi Ini Penghinaan Besar* yang memuat bantahan dari Jokowi, lihat gambar 2.



Ekspres Jokowi (kiri) dan Jusuf Kalla dalam keterangan pers di hadapan awak media terkait program kerja mereka di Bandung, 3 Juli 2014. TEMPO/Chemas Reviparto

Gambar 2 Foto di Berita *Dituding PKI, Jokowi: Ini Penghinaan Besar*

Pada pernyataan para korban inis tersirat konstruksi komunisme versi *tempo.co*. Konstruksi ini dikonstruksikan melalui pernyataan PDIP dan Jokowi yang diidentikan engan perasaan hina mereka. Selain kata ‘hina’ yang terlontar dari Jokowi, identifikasi ini juga tergambar dari pilihan kata “stigma buruk” dan “melecehkan Megawati Soekarnoputri”, yang ditemukan pada berita *Dituding Komunis, PDIP Protes Keras TV One* yang dilontarkan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Penanda-penanda inilah yang dibangun oleh *tempo.co* dalam mengonstruksikan komunisme sebagai ideologi yang buruk.

Pelbagai bantahan dari pelbagai pihak mengenai isu kemunculan komunisme, terutama ketika dikaitkan pada PDIP dan Jokowi, yang diberitakan oleh *Tempo.co* juga menjadi langkah bagi media ini untuk menyebut isu tersebut sebagai *kampanye hitam*. Munculnya isu tersebut dituding merupakan hasil ‘konspirasi’ aktor tertentu. Posisi dari *tempo.co* seperti ini sangat terlihat pada berita *Dituding Berkampanye Hitam, Rob Allyn Membantah*. Mengutip pernyataan lembaga pimpinan Gunawan Muhammad (GM), berita ini menuding bahwa kemunculan isu komunisme pada Pilpres merupakan buah dari konspirasi Rob Allyn. Rob Allyn merupakan konsultan politik dari Prabowo Subianto. Berikut ini kutipan dari berita tersebut yang menggambarkan uraian dari peneliti,

“Adapun situs Indonesia-2014 yang dipimpin Goenawan Mohamad menyebut Allyn sebagai pemecah belah Indonesia. Allyn dinilai sebagai tukang pelintir yang merancang propaganda hitam untuk menghancurkan Jokowi. Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu dituduh sebagai komunis, kafir, anti-Islam, Kristen, memiliki orangtua Cina-Singapura.”

Munculnya GM pada berita tempo.co juga seakan menegaskan posisi tempo.co pada pewacanaan komunisme di Indonesia. Posisi yang oleh peneliti sebut “posisi mendua”. Sikap meragukan narasi Orba tetapi tetap mempertahankan konstruksi buruk dari komunisme menjadi argument utama dalam posisi ini. Posisi tersebut adalah posisi kelas menengah di Indonesia dalam pewacanaan komunisme. Munculnya GM yang terlihat menjadi rujukan utama dalam mencap pewacanaan yang terjadi, semakin meneguhkan pendapat peneliti, yang mengingatkan mengenai sikap Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Sikap kelas menengah yang dimaksud persis dengan argument peneliti tentang posisi mendua. Manikebu sendiri dianggap sebagai motor bagi beririnya kelas menengah di Indonesia (Daniel Lev dalam Steele 2007). Hal ini terlihat dari pernyataan GM di masa lampau, yang menyesalkan pasca aksi kekerasan mengiringi peristiwa G 30 S '65, meski komunis menurutnya pastas diberantas (Steele 2007, p. 77).

Berdirinya Tempo sendiri disinyalir memiliki tarikan ideologis dengan manifesto Kebudayaan (Manikebu). Hal ini dapat dilihat dari tiga pendiri Tempo (Goenawan Muhammad, Bur Rusuanto, dan Usmah) adalah para penandatangan Manikebu tersebut (Stelle 2007).. Manikebu yang beridiri tahun 1963 merupakan sebuah organisasi semi-formal yang ikatannya berdasar penandatanganan sebuah ‘pakta’ tentang berkebudayaan yang tidak ‘partisan’ atau tidak tunduk pada kepentingan politik dan cenderung liberal (Herlambang 2013).

Meki pada tingkat tekstual terdapat beberapa perbedaaan konstruksi atas komunisme, pada tingkat prkatik pewacaan Pilpres kedua media melakukan hal yang mirip. Pada Pilpres 2014 ini dapat terlihat bahwa pembahasan wacana komunisme hanya ditujukan untuk urusan kalah-menangnya para calon. Sehingga peneliti melihat bahwa pewacanaan komunisme pada periode pemilihan presiden ini dijakan wacana politik. Dijadikannya wacana komunisme sebagai wacana politik menegaskan posisi sebagai satu penyangga kontestasi politik Pilpres 2014, khususnya sebagai bahan membentuk legitimasi politik. Legimitasi politik sebagaimana dimengerti peneliti merupakan bagian penting bagi aktor politik dalam suatu pemilihan politik. Legitimasi kekuasaan sendiri dapat diartikan sebagai bentuk “keabsaan individu atau kelompok tertentu dalam memperoleh kekuasaan” (Narwaya 2010, 136).

Komunisme sebagai bagian dari pembentuk legimitasi politik, mak dari itu dapat dikatakan sebagai wacana politik, paling kentara terlihat dari diberitakannya praktik para calon yang menyatakan dirinya tak terkait atau anti terhadap komunisme. Menjadi anti-komunis dalam memantapkan legimitasi politik bagi para capres juga mnjadi sinyal bagi kuatnya sikap anti-komunisme di Indonesia. Hal ini terlihat dari kebtuhan para calon untuk menunjukkan dirinya sebagai anti atau minimal buka komunis. Jika prabowo melakukan hal ini melalui konstruksinya sebagai tantara yang anti-komunis, Jokowi menunjukkan bahwa dia capres yang anti-komunisme melalui pelbagai bantahan atas tudingan dirinya, dan partainya, memiliki kaitan dengan komunis.

Diletakkannya pewacanaan komunisme di antara pertarungan kedua calon juga menunjukkan tentang kesearahan artikulasi yang terjadi. Kedua portal berita ini. Seakan ada kesan, pada kedua portal yang dikaji, bahwa tidak relevan dan tidak politisnya membahas beberapa topik lain diluar kontestasi para calon presiden. Hal ini seakan mengulan temuan Masduki dalam satu kajiannya perihal pemberitaan Pemilu 2004 di Indonesia. Pada artikelnya yang berjudul *Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media dalam Pemilu 2004*, Masduki (2004, p.9) mengatakan, “Media terjebak untuk mengadu dua atau lebih kandidat presiden dengan menghitung kecepatan mereka berlari mengejar kuantitas dukungan”. Pada akhirnya praktik yang dilakukan oleh kedua media yang dikaji ini adalah topik- topik alternatif dalam membahas komunisme seakan lenyap tak terbahas, khususnya gagasan tentang *Rekonsiliasi Nasional Kasus '65*.

Dalam konteks pewacanaan komunisme, topik-topik alternatif semacam Rekonsiliasi Nasional tentu menjadi hal yang pas untuk diartikulasikan. Ketika publik yang setiap hari mengamati perkembangan pilpres, urgensi untuk merevisi wacana Orde Baru tepat untuk disebar, sehingga gagasan tersebut dapat tersebar dan tumbuh dimana-mana. Sehingga gagasan yang pada dasarnya hendak mengatasi pelbagai benturan di tingkat akar rumput masyarakat yang diakibatkan dari pewacanaan komunisme, dapat segera teratasi. Tetapi dengan tidak dimunculkannya pembahasan topik-topik semacam Rekonsiliasi Nasional ini, peneliti melihat bahwa adanya keinginan dari kedua media yang dikaji untuk merawat relasi pewacanaan komunisme. Relasi yang menempatkan sikap anti-komunisme sebagai *genre* utama dalam pewacanaan komunisme di Indonesia.

Dipertahankannya relasi atas komunisme seperti yang diuraikan diatas, juga menjadi petunjuk bagi peneliti untuk mengungkap bahwa kedua media yang dikaji sedang tunduk dengan relasi yang sudah ada, yakni relasi yang dibuat orba. Di titik ini peneliti melihat

bahwa sang penguasa dalam pewacanaan komunisme di Pilpres 2014 adalah Orde Baru. Kuasa Orde baru ini ditunjukkan dari formalisasi pewacanaan komunisme yang digunakan oleh *tempo.co* dan *republika.co.id* sesuai narasi yang dibuatnya. Formalisasi pewacanaan sendiri oleh Bloch (dalam Lerman 2010, p. 82) merupakan wujud lain dari gambaran kekuatan pihak yang berkuasa. Sehingga peneliti menyebut bahwa kedua media ini sedang dan menjadi Aparatus Ideologi Negara (AIN) dari Orde Baru.

Diartikulasikannya wacana komunisme yang dikaji juga memiliki kaitan dengan motif ekonomi dari kedua portal berita yang dikaji. Motif ini dapat ditelaah dari dijadikannya wacana komunisme dalam meningkatkan *traffic*. *Traffic* sendiri dapat disimplifikasi sebagai statistik mengenai jumlah pembaca dari sebuah portal media online. Semakin besar jumlah pembaca maka semakin bagus catatan *traffic* sebuah portal media online. Catatan tentang besaran pembaca inilah yang nantinya akan ditawarkan pada para pengiklan, sebagaimana televisi menukarkan catatan penontonnya atau radio dengan pendengarnya. Selain dengan cara menarik perhatian pembaca melalui dilokalisirnya pembahasan sebagai wacana politik, motif ekonomi dari pewacanaan komunisme ini juga dapat dilihat dari praktik memotong-motong berita.

Praktik pemotongan berita ini dapat ditunjukkan dari beberapa berita yang hanya meliput satu peristiwa. Di satu sisi pemotongan tersebut memang dapat menyiratkan kesan update dari pemberitaan portal berita, tetapi disisi lain hal ini juga menunjukkan keinginan dari portal berita yang dikaji untuk memberpesar angka *pageview*. *Pageview* merupakan salah satu unit dari hitungan *traffic* yang berisi catatan jumlah halaman yang dilihat oleh pengunjung suatu website. Terdapat beberapa *hyperlink* yang mengarahkan pembaca pada halaman lain, dengan cara menyematkan kata “Baca juga” atau “Baca disini”, juga merupakan bagian dari praktik memburu *pageview*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembacaan kritis peneliti terhadap berita-berita dari portal berita online *Tempo.co* dan *Republika.co.id* terkait artikulasi wacana komunisme selama Pilpres 2014, berkaitan dengan dua bidang: bidang politik dan ekonomi.

Pada analisis yang dilakukan pada berita-berita *republika.co.id*, peneliti melihat bahwa media tersebut tunduk pada narasi orba mengartikulasikan komunisme selama Pilpres 2014. Hal ini dapat dilihat dari direproduksi ulangnya dua stigma utama yang dibangun oleh Orba. Dua stigma yang dimaksud adalah stigma anti agama dan stigma dalam peristiwa G30S

‘65. Reproduksi ulang stigma-stigma tersebut untuk memunculkan gambaran ‘komunisme yang berbahaya’ pada berita-beritanya. Melalui stigma anti agama, komunisme dikonstruksikan sebagai yang berbahaya bagi umat islam. Pada stigma ini, komunisme digambarkan sebagai sesuatu yang selalu ingin mendobrak nilai islam serta melalui kesan kejam yang direproduksi dari pertentangan PKI dengan kelompok islam di masa lalu, dalam hal ini NU. Sedangkan melalui stigma dalam peristiwa G30S, komunisme digambarkan sebagai ideologi yang anti Pancasila dan berbahaya bagi Negara. Melalui konstruksi kebangkitan komunisme senyata mungkin, *republika.co.id* terlihat seakan sedang membukakan pintu masuk bagi militer untuk tampil ke pentas politik nasional sekaligus sebagai petanda bagi dukungan media ini terhadap pencalonan militer, Prabowo.

Tempo.co secara jelas memperlihatkan posisi sangat berbeda dalam mengkonstruksikan komunisme. *Tempo.co* menggambarkan bahwa kebangkitan komunisme yang digambarkan sedang bangkit merupakan hal yang bersifat konspiratif dan sebagai bentuk ‘kampanye hitam’, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini Untuk hal inilah *tempo.co* tampak sengaja mengangkat berita-berita yang berisi bantahan pelbagai pihak, khususnya Jokowi dan pengurus PDIP. Di tataran ini, komunisme kemudian dikonstruksi sebagai ideologi yang buruk dan hina. Hal ini dapat dilihat dari ‘rasa hina’ ditonjolkan dari pelbagai bantahan Jokowi-PDIP yang diisukan terkait dengannya.

Sedangkan dalam memandang wacana komunisme, *tempo* mengambil posisi yang peneliti sebut ‘posisi mendua’, yaitu ingin menuntut diselidikinya segala pelanggaran HAM yang terjadi, dengan tetap ingin mempertahankan stigma buruk komunisme. Posisi yang diambil *tempo* ini oleh peneliti dianggap sebagai sebuah hal yang paradoks, sebab “penyelesaian pelanggaran terhadap kasus pelanggaran HAM peristiwa G30S 1965, memerlukan penghapusan stigma-stigma buruk terhadap komunisme (Budiawan 2003), termasuk gambaran buruknya.

Meski pada tingkatan analisis teks, serta posisi politik yang digunakan mengartikulasikan wacana komunisme diantara kedua media yang terlihat berbeda, namun terdapat titik temu apa yang dilakukan oleh kedua media yang dikaji dalam memosisikan wacana politik, yakni sebagai wacana politik Pilpres 2014. Komunisme sebagai wacana politik Pilpres 2014 adalah berguna wacana komunisme selalu berhubungan dengan pertarungan kedua pasang calon, khususnya bagi representasi diri dan membentuk legitimasi politik. Direkatkan pewacanaan komunisme dengan dinamika pertarungan politik yang terjadi selama Pilpres, oleh kedua media yang dikaji dengan sengaja menutup topik alternatif

dalam pewacanaan komunisme yang tumbuh selama era reformasi semacam Rekonsiliasi Nasional, untuk muncul kepermukaan.

Pada akhirnya, pewacanaan komunisme yang terjadi ini dengan sengaja dijadikan bahan baku untuk membentuk komoditas, yakni pembaca. Pembaca inilah yang nantinya disebut *traffic* saat dijahankan ke pasar iklan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiawan 2004, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*, ELSAM, Jakarta.
- Dhakidae, D 2003, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erawati, S 2011, 'Pemberitaan Media Cetak Mengenai Kongres III PDIP Di Bali : Studi Tentang Kecenderungan Narasi Pemberitaan Konres III PDIP 2010 di Surat Kabar Nasional (Kompas, Republika, dan Media Indonesia)', Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
- Eriyanto 2001, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Isi Media*, LKiS, Yogyakarta
- Fairclough, N 1993, *Discourse and Social Change*, Polity Press, Cambridge.
- _____ dan Fairclough, I 2012. *Political Discourse Analysis: A method for Advanced Students*, Routledge, New York.
- Herlambang, W 2013, *Kekerasan Budaya pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*, Marjin Kiri, Tangerang Selatan.
- Heryanto, A 2006, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*, Routledge, New York.
- Honna, J 1999 'Military Ideology in Response to Democratic Pressures During the Late Suharto Era: Political and Institutional Contexts', *Cornell Southeast Asia Program*, Vol. 67, 77-126.
- Keller, A 2009, *Tantangan Dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*, Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office, Jakarta.
- Lerman, C L Terjemahan Mahyuddin, I 2010, 'Wacana Dominan: Suara Institusional dan Kendali Topik', Davis, H dan Walton, P, *Bahasa Citra, Media*, Yogyakarta, p. 75-122.
- Masduki 2004, 'Jurnalisme Politik:Keberpihakan Media dalam Pemilu 2004', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 Nomor 1, 75-90.
- Narwaya, T G 2010, *Kuasa Stigma dan Represi Ingatan*, Resist Book, Yogyakarta.
- Zaki, M 2014, Prof. John Roosa: Identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah 1965, Diakses 10 November, 2014 dari <http://indoproggress.com/2012/09/wawancara-2/>
- Rossa, J Terjemahan Hersri Setiawan 2008, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, Jakarta.
- Steele, J Terjemahan Arif Zulkifli 2007, *Wars Within: Pergulatan Tempo*, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru, Dian Rakyat, Jakarta.
- Wadipalapa, R P 2010, 'Reproduksi Komunisme dalam Perfilman Indonesia Pasca Orde Baru', Skripsi, Universitas Airlangga.
- 'Pers dan Penyaringan Berita', Kompas 9 Februari, 2015, P.5.